



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMAN AZMAR
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
3. NHK : 256288

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.565.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 2830 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. Tanah Seluas 8920 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 10350 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 116.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.711.000.000
III. HUTANG	Rp.	508.306.471
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.202.693.529

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.